

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Filsafat Politik G.W.F. Hegel (1770-1831)

1. Pengertian Politik

Filsafat Hegel dan gagasan tentang politik dari segi yang khusus adalah poros yang dikelilingi mazhab-mazhab politik pada abad ke-19. Darinyalah muncul mazhab-mazhab politik pada abad sekarang. Umpamanya, liberalism muncul untuk melawan gagasan kedaulatan absolut Negara yang diserukan Hegel. Dialektif muncul sebagai titik temu antara Hegel dan Marx. Hegelianisme berpengaruh pula pada kemunculan fasisme di Italia dan politik idealism absolut di Inggris.¹

2. Filsafat Politik Hegel

Pandangan politik Hegel terpenting yang membedakannya dengan selainya adalah penilaiannya yang tinggi terhadap Negara nasionalisme. Negara adalah pengganti individu atau sebuah kumpulan individu yang membentuk kesatuan penting dan mendasar. Tujuan filsafat sejarah Hegelianisme adalah menampakkan keunggulan setiap bangsa dengan jalan dialektika. Sesungguhnya kecerdasan dan jiwa bangsa adalah pencipta hakiki bagi seni, hukum, etika, dan agama. Dari sana, sejarah peradaban merupakan konsekuensi dari peradaban-

¹ Harun Sa-lae, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani di Daerah Patani (Thailand Selatan)*, (Program Pascasarjana Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 37.

peradaban nasionalisme yang dipersembahkan setiap bangsa bagi seluruh manusia.²

Negara bagi Hegel adalah pemandu perkembangan nasionalisme. Negara menyerupai perkembangan pemikiran yang menggabungkan antara keluarga dan masyarakat sipil. Dengan demikian, Negara merupakan gabungan, kesatuan, dan hakikat dari keduanya. Negara juga mencakup kaidah-kaidah moralitas. Kehendak-kehendak individu melebur ke dalam kehendak Negara yang bebas sebagaimana telah kami jelaskan.³

Makanya, filsafat politik Hegel mengandung dua unsur terpenting yang khusus. *Pertama*, dialektika konklusi-konklusi baru yang tidak mungkin dihasilkan tanpa dialektika. *Kedua*, pandangannya tentang Negara nasional sebagai penopang kekuasaan politik.

Hegel berpendapat bahwa keluarga, masyarakat sipil, dan Negara adalah tiga fase untuk sampai kepada yang mutlak. Semuanya mengarahkan segenap kehendak untuk mengabdikan kepada roh (*geist*) atau yang Mutlak.

Keluarga berkembang dari ikatan alami antara dua jenis kelamin menuju ikatan spiritual melalui pernikahan. Sementara itu, pernikahan tidak akan terjalin jika hanya bertopang pada kasih sayang dan keinginan keduanya, tetapi juga harus bertopang pada akal. Pernikahan pertama-tama bertujuan menghasilkan keturunan,

² Harun Sa-lae, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani di Daerah Patani (Thailand Selatan)*, (Program Pascasarjana Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 37.

³ *Ibid.*, hal. 37-38.

kemudian untuk menopang kehidupan sosial dan Negara. Kontinuitas keluarga akan tampak, baik secara material maupun maknawi, dalam partisipasinya mencari nafkah dan bahu-membahu dalam pendidikan anak. Hegel menyerukan larangan berpoligami. Ia menyerukan pula menahan diri menjatuhkan talak, kecuali pada kondisi tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Namun, ketika keluarga diikat oleh ikatan temporal yang akan hilang dengan kematian salah pasangan atau karena tidak, sekumpulan keluarga bersepakat membentuk kehidupan sosial dan saling membantu menjaga kepentingan yang khusus. Dari sinilah, masyarakat sipil tumbuh.⁴

Apalagi keluarga diibaratkan skripsi, sering dengan dialektika Hegel, masyarakat sipil diibaratkan sebagai antithesis. Dalam pandangannya, masyarakat sipil mendekati konsep bentuk-bentuk perkumpulan yang dikaji oleh ekonomi politik. Asalnya, tujuan perkembangan ekonomi adalah melayani kebutuhan individu. Dengan demikian, perkumpulan itu merupakan fase penting dari fase-fase roh objektif. Namun, itu fase paling bawah yang bertugas menangani hubungan-hubungan eksternal, dan berusaha mencakupi kebutuhan setiap individu. Tidak dapat diragukan lagi bahwa kemajemukan kebutuhan-kebutuhan manusia akan menjadikan kerja sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Namun, pada gilirannya, mesin telah mengambil lahan pekerjaan dari manusia.⁵

⁴ Harun Sa-lae, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani di Daerah Patani (Thailand Selatan)*, (Program Pascasarjana Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 38.

⁵ *Ibid.*, hal. 39.

Hegel menegaskan bahwa interaksi ekonomi tidak secara otomatis mempersem bahkan keadilan bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, harus ada penegakan kekuasaan untuk mengantisipasi kriminalitas, menekan keharusan tunduk pada hukum, dan memelihara supermasi hukum. Hanya saja, keadilan yang dihasilkannya bersifat negative. Dengan demikian, merupakan sebuah keharusan untuk melampauinya dengan peraturan positif untuk kerja, suatu peraturan yang dapat mengatasi berbagai keburukan yang dating seperti perbedaan pendapat dan variasi hubungan kenegaraan, juga suatu peraturan yang tidak memaksa pelaku criminal untuk menerima ketetapan yang menjerumuskan pada individualismenya. Bahkan, peraturan itu justru mengeluarkan individu-individu dari keterasingannya, dan mengikat mereka dengan Negara.

Negara adalah sintesis bagi keluarga dan masyarakat sipil. Hegel berkata, “Negara adalah substansi kehidupan sosial yang telah sampai pada taraf kesadaran terhadap dirinya. Negara merupakan dasar keluarga dan masyarakat sipil secara bersamaan. Kesatuan yang direpresentasikan dengan kasih-sayang dalam keluarga juga merupakan substansi Negara. Negara dalam prinsip sosial adalah lefel keluarga dan masyarakat secara bersamaan”.

Negara adalah realita keseluruhan itu sendiri. Negara pada hakikatnya adalah roh yang tampak pada fenomena kehidupan. Negara terdiri dari:

1. Formasi internal dari sisi pertumbuhan dalam dirinya. Ini adalah kebenaran internal dari Negara atau hukum.
2. Eksistensinya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ini adalah kebenaran eksternal dari Negara.
3. Makhluk hidup ini tiada lain hanyalah tahapan-tahapan menuju pertumbuhan pemikiran keseluruhan bagi roh dalam wujud realnya. Ini mengisyaratkan pada sejarah dunia.⁶

Kami perlu mengingatkan bahwa Negara, dari sisi substansinya sebagai roh yang hidup, tidak mungkin ada, kecuali dalam bentuk totalitasnya sehingga keberadaanya sangat tampak pada performa khususnya yang keluar dari satu hakikat universal serta lahir secara terus-menerus dari hakikat rasional. Perumusan undang-undang pada dasarnya adalah pembagian kekuasaan Negara. Bahkan, undang-undang adalah keadilan yang hidup dengan mempertimbangkan posisinya sebagai kebebasan yang real.

Negara berhadapan dengan konflik-konflik keluarga dan konflik-konflik individu dalam masyarakat ekonomi. Negara tidak menggambarkan tugas menghapus setiap konflik dan pertentangan. Hegel tidak menggambarkan Negara dari sisi hubungannya dengan individu-individu dan penyifatannya sebagai penjamin kebebasan mereka, tetapi dari sisi substansi Negara itu sendiri, yakni sebagai pemilik performa yang khusus dan kemerdekaan yang sempurna.

⁶ Harun Sa-lae, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani di Daerah Patani (Thailand Selatan)*, (Program Pascasarjana Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 40.

Performa itulah yang tampak dalam undang-undang kemerdekaan inilah yang disebut dengan pemerintahan.⁷

Hegel percaya mutlak pada kekuasaan Negara yang tidak dibatasi dan tidak ada pertanggungjawaban darinya secara sempurna. Keduanya adalah sebagai konsekuensi dari karakteristik Negara sebagai pemegang kekuasaan keseluruhan dan kedaulatan keseluruhan. Tujuan Negara bagi Hegel adalah perealisasi keseluruhan, yakni perealisasi roh. Tujuannya bukanlah sebagai penjamin kepentingan individu yang mampu dimunculkan ketika diperlukan.⁸

Dengan demikian, Negara dalam pandangan Hegel adalah symbol kekuatan politik dan kekuasaan Negara. Negara yang digambarkannya sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi tidak tirani karena harus tetap tunduk pada undang-undang. Namun, Hegelianisme Negara di atas wilayah undang-undang, bahkan di atas ikatan moralitas apa pun. Oleh karena itu, individu harus tunduk pada Negara secara sempurna.⁹

3. Pengertian Konflik

Sebagai sebuah fenomena sosial, konflik senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai definisi yang membahas tentang konflik. Ahmad Fadi, memberikan definisi tentang konflik ialah suatu proses dimana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha B dengan sebarang usaha yang

⁷ *Ibid.*, hal. 40-41

⁸ *Ibid.*, hal. 41.

⁹ Muhammad Ali, Abdul Mu'ti, 2010 hal. 206.

menghilangkan sehingga mengakibatkan frustrasi pada B dalam usahanya untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingannya.¹⁰

Dengan demikian pada dasarnya proses konflik bermula pada saat satu pihak dibuat tidak senang oleh atau akan berbuat tidak menyenangkan kepada pihak lain mengenai suatu hal yang oleh pihak pertama dianggap penting.

Dari definisi tersebut di atas bahwa konflik di pandang dari sisi perbuatan seseorang yang membuat perasaan tidak senang/nyaman bagi orang lain. Di sisi lain konflik juga bisa dipandang sebagai pertentangan antara satu kelompok/individu dengan kelompok lain dalam bentuk pertentangan. Perbedaan dan persaingan terletak pada apakah usaha satu pihak mampu untuk menjaga dirinya dari gangguan pihak lain dalam pencapaian tujuannya. Persaingan ada bila tujuan pihak-pihak yang terlibat adalah tidak sesuai tetapi pihak-pihak tersebut tidak dapat saling mengganggu. Sebagai contoh, dua kelompok mungkin saling bersaing untuk memenuhi target, bila tidak ada kesepakatan untuk mengganggu pencapaian tujuan pihak lain, situasi persaingan terjadi, tetapi bila ada kesepakatan untuk mengganggu dan kesempatan tersebut digunakan maka akan timbul konflik.¹¹

¹⁰ Ahmad Fadil, *Organisasi & Administrasi*, (Jakarta: Manhalun Nastyi-In Press, 2002), h. 74.

¹¹ Ahmad Fadil, *Organisasi & Administrasi*.(Jakarta: Manhalun Nastyi-In Press), hal. 75.

4. Tahapan Konflik

Konflik selalu berubah, sesuai dengan tahap aktivitas dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini sangat penting diketahui dan digunakan bersama alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik.

Fisher dkk. Memberi gambaran tentang tahapan konflik seperti berikut:

- a. Prakonflik: ini merupakan masa dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sarana di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Biasanya konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi.
- b. Konfrontasi: pada tahap ini berbeda dengan tahap yang diatas, tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Pada tahap ini mungkin akan terjadi pertikaian dan kekerasan, masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan.
- c. Krisis: setelah konfrontasi maka tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan kekerasan terjadi hebat, malah terjadi peperangan.
- d. Akibat: sesudah pertikaian yang hebat, pasti ada dari pertikaian tersebut. Satu pihak menaklukan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah dan kemungkinan setuju bernegosiasi. Ada pun

keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

- e. Pascakonflik: akhirnya, konfrontasi kekerasan diselesaikan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak.¹²

5. Teori-teori Penyebab Konflik

Biasanya muncul konflik itu dengan berbagai penyebabnya, dari beberapa penyebab itu juga ada beberapa teori untuk membantu dalam memahami cara mengelola konflik, diantara lain menurut Fishee dkk:

- a. Teori Hubungan Masyarakat: menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- b. Teori Kebutuhan Manusia: berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.
- c. Teori Identitas: berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
- d. Teori Kesalahpahaman antara Budaya: berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

¹² Fishee dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001), h. 19.

- e. Teori Transformasi Konflik: berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.¹³

B. Sejarah Singkat Negara Patani

Patani dahulu adalah sebuah Negara yang transisi dari kerajaan Melayu Tua yaitu Kerajaan Langkasuka, pada masa itu kerajaan Langkasuka agama resminya adalah agama Hindhu-buddha tetapi juga ada perbedaan pendapat di beberapa sumber yaitu kerajaan langkasuka tidak beragama. Pada abad ke 7 langkasuka berada dibawah naungan kerajaan Sriwijaya yang pusatnya berada di Palembang Indonesia. Kemudian digantikan menjadi Negara Patani dan pada abad ini juga agama Islam mulai masuk ke Patani, pada abad ke 15 dan berkembang pesat sehingga raja Sultan Ismail Syah (Raja pertama) dan pembesar-pembesar memeluk agama Islam dan Negara Patani diresmikan menjadi sebuah Negara yang beragama Islam pada abad ke 15. Kemudian diganti nama lagi menjadi Negara Fathoni Darussalam atau Darul-Ma'arif.¹⁴

Dengan jasa seorang da'i yang berasal dari pasai yang bernama syekh Said yang mendakwah Islam di Patani atau Fathoni Darussalam. Patani terkenal dengan Negara yang kaya raya, dengan memiliki pelabuhan yang sangat terkenal di dunia luar dengan namanya selat Patani. Karena Patani terkenal sebagai Negara pusat pelabuhan dan memiliki sumber daya alam yang cukup besar, maka

¹³ Fishee dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, hal. 8-9.

¹⁴ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*.hal. 16

dicemburui oleh sebuah Negara dibagian utara yaitu Kerajaan Siam atau terkenal pada masa kini yaitu Negara Thailand.

Maka Kerajaan Siam memperluaskan wilayah dan mau menaklukkan sebuah Negara Melayu ini sehingga adanya beberapa kali peperangan antara Siam dengan Patani, dan akhirnya Siam berjaya menaklukkan sebuah Negara Patani dan Negara Patani menjadi Negara dibawah jajahannya pada akhir abad ke 18 (1785 M.) dan setiap tahun Patani harus mengirim upeti kepada Kerajaan Siam.¹⁵

Setelah Negara Patani dijajah Siam, rakyat Patani yang masih sadar bahwa mereka adalah rakyat Patani yang ibu pertiwinya dijajah maka lahirlah perlawanan rakyat local sebanyak sepuluh gerakan mulai sejak tahun 1789-1922 M. setelah Patani dijajah Siam, pada tahun 1816 M. kerajaan Siam memecahkan Negara Patani dibagi menjadi tujuh Negara kecil yaitu negeri Patani, Nongcik, Saiburi, Legeh (Rangek), Yaring, Raman dan Yala.

Pada tahun 1832 M. pemberontak ini secara besar-besaran dan habis-habisan menentang Siam, pemberontak Patani bekerjasama dengan kedah, Kelantan, dan Terangganu. Akhirnya kalah parah, dengan kemarahan Siam terhadap Patani maka di rampas harta dan peralatan di Patani. Dan rakyat Patani sejumlah 4.000 orang ditangkap dan di jujuk keting (tungkai belakang ditusuk rotan agar tidak bisa lari) kemudian dibawa ke Bangkok dan menjadi tawanan serta dipaksa menggali sungai *Sin Sed*. Pada tahun 1902 penghapusan sistem

¹⁵ JEMAP (*Jendela Masyarakat Patani*), Majalah Mahasiswa Patani, edisi I tahun I, Januari, 2016.hal. 3.

kesultanan atau sistem kerajaan di kawasan Patani diresmikan menjadi sebagai Siam (Thailand).¹⁶

Pembagian Negara Patani kali yang kedua pada tahun 1906 dibagi menjadi empat negeri yaitu Patani, Yala, Saiburi dan Legeh (Rangek). Pada tahun 1909 M. Perjanjian Anglo antara Siam dan Inggris, hasilnya yaitu Patani dan Setul tetap di bawah penjajahan Siam sedangkan Kedah, Kelantan, Terangganu dan Perlis termasuk dalam wilayah jajahan Inggris.¹⁷

Pada tahun 1932 M. Negara Patani diserahi menjadi provinsi di wilayah Thailand Selatan, 3 provinsi yaitu:

1. Provinsi Pattani.
2. Provinsi Yala.
3. Provinsi Narathiwat.

Pada tahun 1949 M. lahirnya gerakan otonomi khusus, yang dipimpin oleh Tuan guru Haji Sulong, pada kali ini Haji Sulong mengajukan tuntutan 7 perkara kepada kerajaan Siam, tetapi semua tuntutan ditolak oleh kerajaan Siam dan akhirnya Haji Sulong dihilangkan oleh kerajaan Siam pada malam Sabtu tanggal 13 Agustus 1954 M.¹⁸

Masa berlalu peperangan di Patani masih lagi lanjut sampai tahun 2004 lahirnya gerakan bersenjata sampai saat ini masih berperang dan tidak tahu sampai kapan peperangan ini akan berakhir.

¹⁶ *Ibid*, hal. 3.

¹⁷ JEMAP (*Jendela Masyarakat Patani*), Majalah Mahasiswa Patani, edisi I tahun I, Januari, 2016.hal. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 4.